HUKUM

Jokowi Tunjukkan Ijazah SD Hingga S1

Halaman 6

BOLA

Liga Champions: PSG Ditempel Madrid

Halaman 12

HARIAN
MERDEKA
KAMIS, 5 NOVEMBER 2026 — ASPIRASI RAKYAT — Rp. 15.000 | TERBIT SORE
www.harian-merdeka.com



Kasus Penyadapan: Yusril Sebut 'Siapa Pun' Bisa Diperiksa, Termasuk Jokowi

JAKARTA | Harian Merdeka — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra membenarkan bahwa mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) termasuk pihak yang bisa diperiksa dalam pengusutan skandal penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Halaman 11



Drama Ijazah Bikin Panik: Ke Sidang Sama Seperti Mau Perang!

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Kondisi di sekitar Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur di Cakung sudah dipenuhi aparat keamanan dari TNI dan Polri pada Kamis (5/11/2026) pagi terkait jadwal sidang yang menghadirkan presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sejumlah kendaraan taktis juga terlihat sudah disiagakan di depan gedung pengadilan.

Sejak pagi hari, ratusan anggota TNI dari kesatuan Yonif TP sudah terlihat berbaris dan bersiap melakukan penjagaan. Demikian juga dengan ribuan personel kepolisian dari satuan Baharkam dan Korps Brimob.

Terlihat juga belasan kendaraan taktis di jalan depan gedung pengadilan. Di antara yang disiagakan adalah rantis V8 Pengurai Massa (Raisa) dan Baracuda. Di gerbang pengadilan, telah ditegakkan semacam pembatas serta pengumuman tata tertib di pengadilan.

Sebanyak 6.770 personel gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk mengamankan sidang kedelapan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Jokowi itu. Ribuan aparat disiagakan untuk mengantisipasi kedatangan massa pendukung kedua kubu yang diperkirakan memadati area pengadilan.

Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Alfian Nurrizal mengatakan, total personel yang diterjunkan terdiri atas 5.570 anggota Polri dan 1.200 personel TNI. Pengerahan aparat tersebut disesuaikan dengan perkiraan jumlah massa yang akan hadir selama persidangan berlangsung. **(Egi)**

FWK Ingatkan Pemerintah Jangan Abaikan Penderitaan Rakyat



JAKARTA | **Harian Merdeka**

DPR RI menghormati proses penegakan hukum yang dilakukan Polri terkait kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka.

"Sebagai Ketua Komisi III DPR RI, saya menghormati sepenuhnya proses penegakan hukum yang tengah berlangsung terkait penetapan beberapa perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal," kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman kepada wartawan, Selasa, 3 November 2026.

Habiburokhman menegaskan, proses hukum tersebut harus dipercayakan kepada aparat penegak hukum yang berwenang.

"Langkah ini merupakan bagian dari mekanisme hukum yang harus kita percayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yang berwenang," ucap Politikus Gerindra ini.

Lebih jauh, Habiburokhman berharap penanganan perkara berjalan profesional, objektif, dan transparan hingga tuntas.

"Kami di Komisi III berharap seluruh rangkaian proses hukum tersebut dapat berjalan secara profesional, objektif, dan transparan dari awal hingga akhir," pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, salah satunya Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) pada Selasa, 3 November 2026.

Selain Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Listyo Sigit, penyidik juga menetapkan mantan Sekretaris Pribadinya, Irjen Ahrie Sonta (ASN) serta Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) selaku Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. 1 Sespim Lemdiklat Polri.

Sedangkan, satu orang masih berstatus saksi yakni Irjen Slamet Uliandi.

"Berdasarkan hasil sidik sesuai scientific investigation, penyidik telah menetapkan 3 orang tersangka, LSP, ASN, dan EH," kata Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin saat jumpa pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan pada Selasa malam, 3 November 2026.

Ketiganya diduga melakukan penyadapan di luar tugas institusi kurun waktu pada 2025 hingga Oktober 2026. **(Egi)**

Redaksi HARIAN MERDEKA

Diterbitkan Oleh : PT.JAKARTA RAYA PERS
Pemimpin Umum : Helmy Halim, **Pemimpin Perusahaan** : Alan Oskar, **Wakil Pemimpin Perusahaan** : Verencia Mercy, **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab** : Helmy Halim, **Wakil Pemimpin Redaksi :** Abdul Rohman, **Redaktur Eksekutif** : Egi Hendrawan, **Redaktur Pelaksana** : Agus Irawan, **Redaktur** : Andri Achdiat, Budi Santoso, Taufik, Saepudin, Adam Kamal, **Reporter** : Aceng Abidin, Ahmad Baladi, Sahrul, Robi Liu, Prayitno, Edi.ST, Nurziman, Rafiudin, Abdul Aziz, Siti Marko, RA. Sudrajat, Syarif Hidayat, Irwani Heliawan, Abidin, Hasuri, Mukhtar,Ian Zarian,Juli Rabiati, H.Mulyadi, Didit, Daenk, Ali.R., Kabiro Medan : Umar, S.Pd.I Perwakilan Nias (Sumut) Adi Laoli, **Sekretaris Redaksi** : Syafina Azzahra, **Keuangan** : Yosefin Arwinda Devi, **Manager Iklan** : Muksin, P.Adi, **Iklan** : S Fajar, Wilki Irawan, **Pemasaran** : Hendro, Anwar, Saunan, Agus Black, Dian, **Layout** : Boby Saputra, Fuad, **IT Web** : Walid, Amel, **Bagian Umum/OB** : Wawan, **Penasehat Hukum** : Hanafi Tanawijaya. SH, Dedi Suryadi. SH

Kantor Usaha/Redaksi : Rukan Golden Fatmawati, Jl.RS Fatmawati G-34 No.15 RT.008 RW.006, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. NO. REK. BANK MANDIRI KCP JAKARTA KEMENDIKBUD 1220011807917 a/n JAKARTA RAYA PERS.Telp: 081212262686

Kantor Perwakilan : Ruko ModernLand Blok R 30, Jalan Hartono Raya Kelurahan Kelapa Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Telepon : (021) 59728637. (isi di luar tanggungjawab percetakan)

KPK Usut Dugaan Setoran Jabatan & Rutin Kantah-Kanwil di Lingkaran Nusron Wahid

SERANG |
Harian Merdeka



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan praktik setoran rutin dan setoran jabatan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) saat memeriksa Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Penyidik juga mengorek tugas dan kewenangan Nusron, termasuk terkait pengurusan sertifikasi tanah dan Hak Guna Bangunan (HGB).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, Nusron diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan suap pengurusan HGB dan gratifikasi di lingkungan kementerian tersebut. Keterangan Nusron dibutuhkan untuk mendalami dua klaster perkara yang terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT).

"Sehingga dalam pemeriksaannya, penyidik mengonfirmasi terhadap saksi Saudara NW berkaitan dengan tugas dan kewenangannya selaku Menteri ATR/BPN seperti apa," kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (4/11/2026) petang.

Menurut Budi, penyidik turut mendalami tugas dan kewenangan di Kementerian ATR/BPN yang berkaitan dengan sertifikasi tanah, HGB, dan urusan pertanahan lainnya. Hal ini karena terdapat pendistribusian kewenangan dalam proses penerbitan sertifikasi tersebut.

Selain itu, penyidik mengonfirmasi kewenangan Nusron dalam penempatan jabatan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

"Ini kaitannya dengan dugaan adanya setoran rutin ataupun setoran jabatan yang terjadi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, termasuk soal dugaan setoran rutin dari tingkat kantah (kepala kantor pertanahan), kanwil (kepala kantor wilayah), dan ke atas (direktur jenderal hingga menteri)," imbuhnya.

Pemeriksaan juga mendalami uang yang diduga diterima sejumlah orang kepercayaan Nusron yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik mengonfirmasi keterkaitan Nusron, pengetahuannya, hingga peruntukan uang tersebut.

Budi mengatakan penyidik masih melakukan telaah, analisis, serta pencocokan dengan alat bukti yang telah diperoleh sebelumnya. Terlebih, pemeriksaan terhadap Nusron masih berada pada tahap awal penyidikan.

"Dan tentu nanti juga terbuka kemungkinan untuk dilakukan pemeriksaan kembali. Artinya, sama-sama tunggu perkembangan dari penyidikan perkara ini," lanjut Budi.

Nusron menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK selama sekitar 5,5 jam. Namun, dia enggan membeberkan materi pemeriksaan yang dijalaninya.

Berdasarkan pantauan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (4/11/2026), Nusron keluar dari ruang pemeriksaan di lantai 2 sekitar pukul 14.45 WIB, setelah tiba pukul 09.22 WIB.

"Saya pejabat publik, seorang menteri. Kalau dinas ke luar negeri, apalagi selama ini, dipastikan ada surat persetujuan dari Kementerian Sekretariat Negara. Jadi, kami tidak ada hal-hal...," ujar Nusron.

Pernyataan Nusron tersebut tidak berlanjut karena terjadi kericuhan antara ajudannya dan awak media. Dua orang ajudannya berupaya menghalangi wartawan dan mengarahkan Nusron menuju mobil yang telah menunggu di depan Gedung KPK. **(Egi)**

Ajudan Sempat Ricuh, Nusron Wahid Enggan Buka Suara Soal Pemeriksaan KPK



Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid akhirnya rampung menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (4/11/2026).

Setelah diperiksa sekitar 5,5 jam sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) dan gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, Nusron memilih tidak mengungkapkan materi pemeriksaannya.

Berdasarkan pantauan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Nusron keluar dari ruang pemeriksaan di lantai dua sekitar pukul 14.45 WIB. Dia tiba di gedung KPK pada pukul 09.22 WIB.

Saat dicecar pertanyaan oleh awak media, Nusron hanya menyinggung prosedur persetujuan perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat publik.

"Saya pejabat publik, seorang menteri. Kalau dinas ke luar negeri, apalagi selama ini, dipastikan ada surat persetujuan dari Kementerian Sekretariat Negara. Jadi, kami tidak ada hal-hal...," ucap Nusron.

Namun, pernyataan Nusron terhenti akibat kericuhan antara ajudannya dan awak media. Dua orang ajudannya berupaya menghalangi wartawan yang hendak meminta keterangan lebih lanjut sebelum Nusron menuju mobil yang telah menunggu di depan Gedung KPK.

Sebelumnya, KPK membenarkan Nusron datang ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan suap pengurusan HGB dan gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Nusron diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, kehadiran Nusron pada Rabu (4/11/2026) merupakan pemenuhan panggilan pemeriksaan sebelumnya.

"Jadi, sebenarnya memang tidak ada penjadwalan pemeriksaan untuk hari ini," ungkap Budi dalam keterangannya, Rabu (4/11/2026).

"Saat ini, yang bersangkutan masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik," sambungnya.

Sebelumnya, KPK menyatakan akan segera memanggil Nusron karena penyidik membutuhkan keterangannya untuk mendalami perkara tersebut. **(Egi)**

PB PII Sampaikan 7 Rekomendasi RUU Perampasan Aset ke Komisi III DPR



JAKARTA | **Harian Merdeka**

Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI untuk menyampaikan pandangan, kajian akademis, serta rekomendasi terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, Rabu (4/11/2026), di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta.

Dalam forum tersebut, Ketua Umum PB PII, Amsal, memaparkan bahwa RUU Perampasan Aset merupakan instrumen penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi sekaligus memastikan pemulihan kerugian negara. Menurutnya, penegakan hukum tidak cukup hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga harus mampu mengembalikan aset negara yang berasal dari tindak pidana.

Amsal menegaskan bahwa PB PII mendukung percepatan pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset. Namun, dukungan tersebut harus disertai dengan jaminan kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, transparansi, serta pengawasan peradilan yang ketat.

"Korupsi bukan hanya persoalan kerugian keuangan negara, tetapi juga merupakan tindakan yang merampas masa depan generasi muda. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan justru hilang akibat praktik korupsi. Karena itu, pemulihan aset hasil kejahatan menjadi bagian penting dari upaya menghadirkan keadilan bagi masyarakat," papar Amsal.

Dalam pemaparannya, PB PII menggarisbawahi bahwa mekanisme perampasan aset harus dirancang secara konstitusional melalui model hibrida, yakni jalur in personam yang berbasis pada pelaku dan jalur in rem atau Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) yang berbasis pada aset dalam kondisi tertentu.

PB PII juga menolak segala bentuk perampasan aset secara administratif dan sepihak tanpa putusan pengadilan. Menurut Amsal, kewenangan perampasan aset harus tetap berada dalam koridor due process of law agar tidak membuka ruang kesewenang-wenangan aparat maupun penyalahgunaan kekuasaan.

Sebagai bentuk kontribusi terhadap pembahasan RUU tersebut, PB PII menyampaikan tujuh rekomendasi strategis, yaitu:

1. *Kejelasan Definisi dan Ruang Lingkup Aset*, termasuk aset tidak berwujud, aset digital, serta hasil pengembangan aset untuk mencegah penghindaran perampasan.
2. *Pengawasan Peradilan yang Ketat*, dengan memastikan seluruh tindakan paksa mendapatkan izin pengadilan dan melalui mekanisme validasi yudisial.
3. *Perlindungan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik*, termasuk pasangan, ahli waris, kreditur, dan korban yang memiliki kepentingan sah atas aset.
4. *Kejelasan Standar Pembuktian*, dengan menegaskan bahwa beban pembuktian keterkaitan aset dengan tindak pidana berada pada negara.
5. *Pengelolaan Aset yang Transparan dan Akuntabel*, melalui penilai independen, pemisahan kewenangan aparat penegak hukum dan pengelola aset, serta mekanisme lelang terbuka.
6. *Jaminan Ganti Rugi dan Pemulihan Hak*, bagi pihak yang mengalami kesalahan perampasan maupun kerugian akibat penyusutan nilai aset selama proses penyitaan.
7. *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan*, khususnya dengan KUHP Baru, UU Penyesuaian Pidana, dan KUHAP Baru.

Selain itu, PB PII menyoroti pentingnya antisipasi terhadap kejahatan keuangan modern, termasuk penyembunyian aset melalui mata uang kripto, korporasi cangkang, nominee, dan yurisdiksi lintas negara. Pelacakan aset juga harus tetap memperhatikan perlindungan data pribadi serta memastikan hasil rampasan negara dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

Dalam aspek pengawasan demokrasi, Amsal mengingatkan agar RUU Perampasan Aset tidak berubah menjadi instrumen represi politik atau alat penargetan selektif terhadap pihak tertentu. Oleh sebab itu, PB PII mendorong adanya perluasan ruang praperadilan, pengawasan DPR secara berkala, kanal pengaduan independen, serta larangan pemberian insentif finansial kepada aparat penegak hukum yang bersumber langsung dari hasil rampasan aset. **(Egi)**



Dasco Cawapres? Cuma Pengalihan Sadap!

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengklarifikasi kabar yang menyebut dirinya akan menjadi calon wakil presiden (cawapres) dengan memastikan bahwa kabar tersebut adalah informasi bohong atau hoaks.

Dia menyampaikan hal itu melalui sebuah unggahan di media sosial X pada Rabu (4/11) malam, yang kemudian diunggah ulang melalui akun Instagram resminya pada Kamis pagi ini.

"Saya pastikan Itu hoax," ungkap Dasco dari akun media sosialnya yang dipantau di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, isu hoaks mengenai dirinya yang akan menjadi cawapres adalah upaya pengalihan sorotan publik dari kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden, pejabat, dan tokoh lainnya oleh perwira Polri yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

"Ada upaya pengalihan isu dari hot isu penyadapan ilegal menjadi Dasco akan jadi cawapres," katanya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi berpendapat dugaan kasus penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal terhadap Kepala Negara serta sejumlah pejabat negara berpotensi mengarah pada perbuatan makar.

"Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori, bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar," kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11).

Prasetyo mengatakan tindakan tersebut juga mengarah pada perbuatan yang membahayakan kepentingan negara, termasuk keselamatan pimpinan negara.

Dia menilai tindakan penyadapan, penghilangan barang bukti elektronik, dan akses ilegal yang menyasar Kepala Negara serta sejumlah pejabat negara merupakan tindakan serius, terlebih karena hal-hal tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. **(Egi)**

Mualem Temui Prabowo di Istana, Bahas Dana Otsus Hingga Bendera Aceh



JAKARTA | **Harian Merdeka**

Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem menemui Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/11).

Pertemuan itu diunggah dilindungi akun Instagram @muzakirmanaf1964 pada Rabu (4/11) malam yang diunggah kembali di story akun Instagram Sekretariat Kabinet.

"Saya menemui Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/11/2026)," tulis Muzakir dalam unggahannya.

Turut hadir dalam pertemuan itu, Mensesneg Prasetyo Hadi, Seskab Teddy Indra Wijaya, dan Staf Khusus Gubernur Aceh Teuku Irsyadi.

Mualem menyebut pertemuan itu membahas sejumlah agenda penting Aceh, meliputi keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus), penyelesaian dan kepastian hukum mengenai Bendera Aceh, dan penyelesaian status tanah wakaf Blang Padang.

Lalu, Mualem menyebut pertemuan itu juga turut membahas tindak lanjut surat kepresidenan tahun 2017 terkait PATNA, percepatan tindak lanjut keputusan terkait Blok Rantau, serta usulan dana abadi bagi mantan kombatan GAM.

"Kami juga membahas mengenai tindak lanjut surat kepresidenan tahun 2017 terkait PATNA, percepatan tindak lanjut keputusan terkait Blok Rantau, serta usulan dana abadi bagi mantan kombatan GAM," ucap dia.

Mualem mengatakan Prabowo merespons positif berbagai usulan yang disampaikan tersebut.

"Semoga pertemuan ini menjadi langkah positif bagi penyelesaian agenda strategis dan kemajuan Aceh ke depan," ucapnya. **(Egi)**

Gandeng Kemendag di Primakara, Komisi VI DPR RI Ajak Mahasiswa Berwirausaha

DENPASAR | **Harian Merdeka**

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Gde Sumarjaya Linggih, mendorong generasi muda untuk tidak sekadar menjadi penonton di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital dan perdagangan global. Mahasiswa dituntut berani berwirausaha, melahirkan inovasi, serta memiliki daya saing untuk membawa produk lokal menembus pasar internasional.

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara dalam workshop dan Knowledge Sharing tentang Perdagangan dan Ekspor yang digelar atas sinergi bersama Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI di Primakara University, Denpasar, Selasa (3/11/2026).

"Materi kita sebenarnya lebih banyak bagaimana menumbuhkan wirausaha muda, menumbuhkan semangat berwirausaha, hingga bagaimana kita menghadapi go global," ujar pria yang akrab disapa Demer tersebut dalam keterangannya.

Dorong Mentalitas Pasar Global

Politisi senior asal Bali tersebut menegaskan bahwa keberanian mengambil peluang harus diimbangi dengan kemampuan membaca tantangan zaman, kreativitas, serta mentalitas yang tangguh. Menurutnya, generasi muda tidak boleh cepat puas hanya dengan menguasai pasar domestik.

"Keberanian mengambil peluang harus diimbangi dengan kemampuan membaca perkembangan zaman. Generasi muda perlu memiliki pola pikir terbuka dan mulai melihat potensi perdagangan internasional sebagai ruang pertumbuhan utama," kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI ini.

Ia menambahkan, terbukanya akses teknologi dan perdagangan digital saat ini memberikan ruang yang sangat luas bagi mahasiswa untuk menjadi pencipta lapangan kerja (job creator), bukan sekadar pencari kerja (job seeker).



Kaitan Pertumbuhan Ekonomi dan Human Development

Selain menekankan pentingnya kewirausahaan, Demer turut menyoroti stabilitas perekonomian nasional. Ia mengaitkan arah pembangunan ekonomi Indonesia saat ini dengan pendekatan sosial-demokrasi yang diterapkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi nasional tidak boleh hanya diukur dari sekadar angka indikator makro, melainkan harus berjalan selaras dengan pembangunan manusia, kualitas sosial, serta keberlanjutan lingkungan (sustainability).

"Kita sudah mulai bergeser ke sosial-demokrasi. Pak Prabowo menerapkan sosial-demokrasi, di mana pertumbuhan ekonomi harus dibarengi oleh human development, social development, dan sustainability," tutur Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali tersebut.

Ia meyakini, integrasi antara penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan sektor ekonomi kerakyatan akan menjadi pondasi kuat bagi Indonesia dalam menghadapi dinamika ekonomi global di masa depan. **(Egi)**

Korupsi Nikel: Saksi Kemendag Diperiksa Kejagung



JAKARTA | **Harian Merdeka**

Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung memeriksa seorang saksi dari Kementerian Perdagangan (Kemendag), Rabu (4/11/2026).

Pemeriksaan tersebut dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas nikel periode 2017–2020.

Saksi berinisial ON hadir memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan terkait perkara tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa pemeriksaan saksi merupakan bagian dari upaya penyidik memperkuat pembuktian dan melengkapi berkas perkara.

"Pemeriksaan saksi oleh Penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," demikian keterangan resmi Kejaksaan Agung yang disampaikan Anang Supriatna, Rabu (4/11/2026).

Anang menyampaikan, proses penyidikan perkara tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan profesionalitas, independensi, dan akuntabilitas.

"Proses penyidikan juga dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian," demikian keterangan Kejaksaan Agung.

Pemeriksaan terhadap ON menjadi bagian dari rangkaian penyidikan dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel periode 2017 hingga 2020. **(Egi)**

Jokowi Tunjukkan Ijazah SD Hingga S1



JAKARTA | **Harian Merdeka**

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan ijazah dari tingkat SD hingga S1 miliknya di hadapan Roy Suryo dan pengunjung dalam sidang kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim).

Jaksa sebelumnya menunjukkan barang bukti ijazah Jokowi ke hadapan majelis hakim. Lalu, Jokowi meminta izin ke majelis hakim untuk menunjukkan ijazah tersebut ke hadapan pengunjung sidang.

"Kalau diperkenankan, saya mau menunjukkan kepada pengunjung juga yang mulia. Karena saya sudah berjanji untuk menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan ijazah S1 saya. Mohon Yang Mulia," kata Jokowi dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis.

Hakim kemudian mengizinkan Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya kepada pengunjung sidang.

Setelah itu, Jokowi membalikkan badan dan langsung memperlihatkan ijazahnya ke hadapan pengunjung sidang hingga awak media.

Setelah itu, Jokowi menunjukkan ijazahnya ke hadapan majelis hakim lalu kembali duduk di kursi persidangan.

Sebelumnya, Jokowi telah membeberkan riwayat pendidikan mulai dari sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi saat memberikan kesaksian dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim).

"Jadi dimulai dari SD, SD saya di SD Negeri Nomor 111 Kota Surakarta. Kemudian SMP di SMP Negeri 1 Kota Surakarta, kemudian SMA di SMA Negeri 6 Kota Surakarta," kata Jokowi di hadapan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis.

Setelah menyelesaikan pendidikan SMA, Jokowi melanjutkan kuliah pada jenjang sarjana di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

Keterangan itu disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang meminta dirinya menjelaskan riwayat pendidikan secara berurutan dari SD hingga perguruan tinggi.

Dalam persidangan itu, hadir Kaesang Pangarep dan Kahiyang Ayu untuk mendampingi sang ayah saat memberikan kesaksian dalam sidang di PN Jaktim. **(Egi)**

> "Kalau diperkenankan, saya mau menunjukkan kepada pengunjung juga yang mulia. Karena saya sudah berjanji untuk menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan ijazah S1 saya. Mohon Yang Mulia,"
>
> Joko Widodo (Jokowi)
> Presiden ke-7 RI

Nekat Bebaskan Pengedar Obat , 8 Polisi Karawang Disanksi Propam



BANDUNG | **Harian Merdeka**

Sebanyak delapan anggota Polresta Karawang saat ini diperiksa Bidang Propam Polda Jawa Barat (Jabar), setelah mereka membebaskan seorang pengedar obat keras tertentu (OKT).

Kapolresta Karawang Kombes Pol Mario Prahatinto membenarkan peristiwa pemeriksaan propam terkait dugaan delapan anggotanya membebaskan pengedar OKT. Dari delapan yang diperiksa, satu di antaranya yakni Kasat Narkoba Polresta Karawang Kompol Afrizal Wahyudi Achmad.

"Sudah ditangani Propam Polda Jawa Barat," ucap dia saat dikonfirmasi, Rabu (4/11).

Ia menuturkan delapan orang anggota yang telah diperiksa Propam Polda Jabar telah dinonaktifkan dari jabatan dan tugas. Mereka pun telah dimutasi ke Polda Jawa Barat.

"Iya untuk saat ini semuanya sudah dinonaktifkan, sudah dimutasi ke Polda Jabar," kata dia.

Hingga saat ini, belum diketahui kronologis pembebasan pengedar OKT yang dilakukan jajaran Satresnarkoba Polresta Karawang tersebut.

Apa yang dilakukan oleh delapan anggota Polresta Karawang dengan membebaskan pengedar OKT berbanding terbalik dengan apa yang saat ini gencar dilakukan Polri.

Pasalnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memerintahkan seluruh jajarannya agar lebih masif memberantas peredaran narkotika di Indonesia.

Suyudi mengatakan pemberantasan narkoba di tanah air membutuhkan langkah yang masif dan berkelanjutan. Ia menegaskan hal itu sangatlah penting sebagai komitmen Polri dalam melindungi masyarakat dari bahaya narkotika.

"Saya ingin membersihkan Indonesia dari peredaran narkoba yang sekarang sudah semakin masif. Kita harus lebih masif dalam bertindak," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (13/10).

Oleh sebab itu, ia menekankan pentingnya kerja sama dari pelbagai pihak untuk menekan ruang gerak narkotika di seluruh wilayah.

"Pemberantasan narkoba tidak bisa dilakukan sendiri. Diperlukan kerja sama seluruh pihak agar peredaran narkotika dapat dicegah dan ruang gerak bandar semakin terbatas," ujarnya.

(Egi)

Dugaan Korupsi Tambang PT CCM, Kejagung Cecar Saksi Kementerian ESDM

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa seorang saksi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pertambangan batu bara oleh PT CCM di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) pada Selasa (3/11/2026).

Saksi berinisial S itu memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan terkait perkara dugaan korupsi pertambangan batu bara yang berlangsung pada periode 2013 hingga 2025.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari upaya penyidik memperkuat alat bukti dalam perkara tersebut.

"Pemeriksaan saksi oleh Penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," Kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supiatna, Rabu (4/11/2026).

Kejagung menegaskan proses penyidikan dilakukan secara profesional, independen, dan akuntabel.



Penyidik juga tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah serta prinsip kehati-hatian dalam menangani perkara tersebut. **(Egi)**

ANYA GERALDINE AGAK CEMAS DENGAN ULAR

JAKARTA |
Harian Merdeka

Aktris Anya Geraldine mengungkap pengalamannya beradu akting dengan ular dalam film horor terbaru produksi Starvision, Dewi Siluman Ular. Dalam film yang dijadwalkan tayang di bioskop mulai 12 November 2026 itu, Anya dipercaya memerankan karakter utama bernama Dewi, sosok siluman ular yang menikah dengan manusia.

Film garapan sutradara Azhar Kinoi Lubis tersebut diadaptasi dari kisah nyata yang viral melalui podcast Nikah Sama Jin milik Prasodjo Muhammad. Anya mengaku sempat merasa cemas ketika mengetahui harus berakting langsung dengan ular.

"Ya jujur sebenarnya waktu awal syuting itu, aku ketika tahu aku harus berakting dengan si ular ini juga, aku pakai sistem wallahualam saja, dan bismillah dan baca Al-Fatihah ketika sebelum take. Tapi alhamdulillah maksudnya semuanya berjalan lancar, mungkin juga karena aku ada trust sama ularnya juga gitu ya, jadi ketika kita ada trust kan pembawaannya lebih calm, terus jadi semuanya lancar saja," kata Anya Geraldine di Epicentrum, Jakarta Selatan, kemarin.

Tak hanya harus berinteraksi dengan ular, Anya juga mendapat tantangan lain karena harus memerankan Dewi dalam dua wujud berbeda, yakni sebagai manusia dengan penampilan memikat dan makhluk gaib berwujud siluman ular.

Untuk mewujudkan karakter tersebut, Anya harus menjalani proses pemasangan prostetik selama kurang lebih tiga jam setiap hari. Dia juga menggunakan softlens khusus demi menunjang penampilannya sebagai Dewi.

"Jadi sebenarnya ini tuh juga adalah salah satu first experience aku di mana aku tuh syuting bukan menjadi manusia biasa gitu ya. Dan of course ini adalah challenge untuk aku. Awalnya pas belum mulai syuting tuh aku kepikiran selain untuk pendalaman karakter Dewinya gimana, terus nanti kostum dan prostetiknya itu juga gimana. Awal-awal sempat ada anxious-nya dikit," ujar Anya.

"Tapi ternyata setelah menjalani itu, prostetiknya itu sekitar tiga jam gitu ya kita bikin setiap hari. Pakai softlens-softlens itu juga, terus habis itu sama ular juga. Tapi entah kenapa ketika sudah di set dan sudah menjalani itu enjoy banget, jadi aku nggak ada rasa berat atau beban sama sekali gitu," lanjutnya.

Anya mengaku justru merasa antusias mendapatkan kesempatan memerankan karakter yang belum pernah dijajal sebelumnya. Dia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada produser dan sutradara yang telah mempercayakan peran tersebut kepadanya.

"Karena saking excited-nya mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang Dewi deh kayaknya. Jadi kayak, ya ampun senang banget. Makasih ya Pak Parwez, makasih Bang Kinoi untuk kesempatannya. Bangga banget sih," tuturnya. **(Dts)**



Imbas Boikot Massal: Emiten Raffi Ahmad Kena Panggil Bursa Efek!

JAKARTA |
Harian Merdeka



PT Rans Entertainment Indonesia Tbk (RANS), emiten milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, tengah menghadapi sorotan setelah gelaran Rans Carnival di Yogyakarta diwarnai aksi boikot sejumlah pengisi acara hingga dugaan pengerahan massa bayaran.

Persoalan tersebut bahkan menarik perhatian Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mencecar manajemen RANS dengan sejumlah pertanyaan terkait polemik penyelenggaraan acara tersebut. Dalam keterbukaan informasi, situasi ini menjadi sorotan terhadap pengelolaan kegiatan usaha dan reputasi perusahaan di tengah upaya emiten mengembangkan bisnisnya.

Direktur Keuangan RANS, Rumunggu Yokonapita, membenarkan adanya sejumlah pengisi acara yang mengundurkan diri dari Rans Carnival di Yogyakarta pada pekan lalu. Namun, ia menyebut keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan masing-masing pihak.

Pada hari pertama penyelenggaraan, acara tetap berlangsung meskipun sejumlah tenant dan pengisi acara memilih mundur. Kondisi tersebut membuat Rans Carnival terlihat sepi pengunjung.

Situasi berbeda terlihat pada hari kedua ketika jumlah pengunjung tampak meningkat. Namun, keramaian tersebut justru memunculkan persoalan baru setelah beredar dugaan adanya pengerahan massa bayaran untuk meramaikan acara.

Dugaan itu mencuat setelah sejumlah warga sekitar menyampaikan informasi melalui media sosial mengenai kedatangan rombongan warga menggunakan beberapa armada bus. Pola kedatangan tersebut dinilai tidak lazim dibandingkan penyelenggaraan Rans Carnival sebelumnya.

Bahkan, beredar dugaan bahwa warga yang datang mendapatkan imbalan sebesar Rp50.000. Namun, manajemen RANS membantah keterlibatan perusahaan dalam aktivitas tersebut.

"Terkait dugaan pengerahan warga dengan imbalan Rp50.000, perseroan menegaskan bahwa perseroan tidak menginstruksikan, menginisiasi, maupun mendanai kegiatan tersebut," kata Rumunggu.

Di tengah polemik tersebut, manajemen RANS berupaya meyakinkan investor bahwa persoalan Rans Carnival tidak akan mengganggu bisnis perusahaan. Rumunggu menegaskan aksi boikot maupun dugaan pengerahan massa tidak berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha dan prospek kinerja saham RANS ke depan. **(Egi)**







Ketua DPRD Kota Serang Buka Suara Soal Anggota Dewan Tersangka Pencabulan



JAKARTA | **Harian Merdeka**

Kasus dugaan pencabulan yang menjerat seorang anggota DPRD Kota Serang berinisial DK menjadi perhatian publik. Ketua DPRD Kota Serang turut memberikan tanggapan setelah DK ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan perbuatan cabul terhadap seorang perempuan di Kabupaten Pandeglang, Banten.

DK ditetapkan sebagai tersangka oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Pandeglang. Politikus yang diketahui merupakan purnawirawan TNI tersebut diduga melakukan pencabulan terhadap korban sebanyak dua kali.

Berdasarkan laporan korban, peristiwa pertama diduga terjadi pada Januari 2026 di sebuah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikontrak oleh DK. Sementara kejadian kedua dilaporkan berlangsung pada Februari 2026 di tempat kontrakan korban.

Kanit PPA Satreskrim Polres Pandeglang, Ipda Widianto, membenarkan penetapan DK sebagai tersangka.

"Saat ini unit PPA Satreskrim Polres Pandeglang telah menetapkan tersangka untuk kasus perbuatan cabul, dengan inisial DK. Yang mana DK ini adalah seorang pensiunan dari TNI, yang sekarang menjabat sebagai anggota Dewan di (wilayah) Banten," kata Widianto.

Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa delapan orang saksi, termasuk saksi ahli. Penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti elektronik berupa rekaman kamera pengawas atau CCTV.

Rekaman tersebut telah diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri. Hasil pemeriksaan laboratorium itu juga telah diterima penyidik.

Atas dugaan perbuatannya, DK disangkakan melanggar Pasal 414 ayat (1) KUHP serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Sementara itu, kuasa hukum DK, Erwanto, menyatakan pihaknya tengah mengupayakan agar kliennya tidak dilakukan penahanan.

Menurut Erwanto, pengajuan penangguhan penahanan merupakan bagian dari hak tersangka sesuai ketentuan perundang-undangan. Meski demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan penyidik kepolisian.

"Kita sedang mengupayakan untuk tidak dilakukan penahanan. Nah itu semua wewenang dari pihak kepolisian Kabupaten Pandeglang direalisasi atau tidaknya. Cuman sesuai dengan aturan yang berlaku bahwa itu adalah hak-hak tersangka sesuai aturan perundangan-undangan," ujarnya. **(Egi)**



Kanwil BPN Banten dan Untirta Kolaborasi Perbaiki Validitas Data Agraria

SERANG | **Harian Merdeka**

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) menjalin kerja sama dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Banten melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Memorandum of Understanding/ MoU) dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sumber daya manusia di bidang agraria dan tata ruang. Kegiatan tersebut berlangsung pada Selasa (03/11/2026) di Gedung Rektorat, Kampus Untirta Sindangsari, Kabupaten Serang.

Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan langsung oleh Rektor Untirta Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. dan Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten Horison Mocodompis, S.E., M.M., C.Med., QCRO. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh jajaran pimpinan dari kedua institusi, di antaranya para Wakil Rektor, Kepala Lembaga, Kepala Biro, Dekan, Direktur Pascasarjana, serta sejumlah pejabat di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Banten.

Kerja sama ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan kedua institusi untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung pelayanan publik di bidang pertanahan dan tata ruang, sekaligus mengoptimalkan peran perguruan tinggi dalam pengembangan keilmuan, penelitian, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten Horison Mocodompis menyampaikan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan pertanahan, baik melalui kontribusi akademisi maupun keterlibatan mahasiswa. Menurutnya, kolaborasi dengan perguruan tinggi dapat membantu menghadirkan kajian ilmiah serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan dan layanan pertanahan.

Horison menjelaskan bahwa salah satu tantangan dalam pelayanan pertanahan saat ini adalah kualitas dan validitas data. Menurutnya, integrasi data spasial dan tekstual menjadi faktor penting dalam mendukung transformasi layanan pertanahan berbasis elektronik agar proses pelayanan dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan akuntabel. **(Egi)**

BNPB Sampaikan Duka Cita atas Gugurnya Tiga Prajurit TNI Saat Tangani Karhutla

JAKARTA |
Harian Merdeka

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan belasungkawa atas gugurnya tiga prajurit TNI Angkatan Darat (AD) dalam operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah.

Kristomei mengatakan, ketiga prajurit tersebut gugur saat menjalankan tugas kemanusiaan dalam upaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah.

"Kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya tiga orang prajurit TNI dalam operasi penanggulangan karhutla di Kalimantan Tengah kemarin," kata Kristomei kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/11).

Ia juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memberikan dukungan kepada petugas gabungan yang saat ini masih bekerja menangani karhutla di sejumlah wilayah.

Menurut dia, dukungan masyarakat sangat dibutuhkan agar upaya penanggulangan kebakaran dapat berjalan optimal. Salah satunya dengan tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan yang berpotensi memperluas titik api serta menghambat proses pemadaman.

"Saya juga mengimbau dan mengajak seluruh masyarakat Indonesia, mari sama-sama kita bantu, mari sama-sama kita dukung saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan tugas dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan dan lahan," ujarnya.

Sebelumnya, TNI AD mengerahkan personel untuk mengevakuasi delapan kru helikopter yang mengalami kecelakaan saat menjalankan operasi pemadaman karhutla di perairan Desa Sungai Perlu, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Rabu (4/11).

Berdasarkan siaran pers resmi TNI AD, kecelakaan melibatkan Helikopter Mi-17V5 milik Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Puspenerbad) yang terjadi sekitar pukul 11.18 WIB.

Helikopter tersebut sebelumnya lepas landas dari Kuala Pembuang pada pukul 09.55 WIB untuk melaksanakan misi penanganan karhutla di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP). **(hmi)**

> "Kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya tiga orang prajurit TNI dalam operasi penanggulangan karhutla di Kalimantan Tengah kemarin,"
>
> Letjen TNI Kristomei Sianturi
> Kepala Badan Nasional
> Penanggulangan Bencana (BNPB)



KASUS PENYADAPAN:

Yusril menegaskan, penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan terhadap siapa pun apabila ditemukan fakta serta alat bukti yang cukup.

"Ya, termasuk siapa pun. Berarti siapa pun, ya. Ya tidak terbatas pada orang-orang tertentu, tapi kita tidak bisa apriori mengatakan menyangka itu, menyangka ini," kata Yusril kepada wartawan di Banda Aceh, Rabu (4/11/2026).

Meski demikian, pernyataan tersebut bukan berarti Jokowi telah dinyatakan terlibat atau menjadi sasaran pemeriksaan dalam perkara tersebut. Yusril meminta semua pihak tidak berspekulasi mengenai siapa saja yang mungkin terlibat sebelum penyidik mengungkap fakta-fakta hukum.

Dia menegaskan, penegakan hukum dalam perkara ini akan dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu sesuai arahan Presiden. Karena itu, proses hukum tidak terbatas pada orang-orang tertentu selama terdapat dasar hukum dan bukti yang mencukupi.

"Pada intinya sih siapa pun yang cukup kuat fakta-fakta dan alat-alat buktinya untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan tentu akan dilakukan terhadap siapa pun," ujarnya.

Yusril juga mengungkapkan bahwa jumlah orang yang diperiksa dalam perkara tersebut terus bertambah. Namun, hingga saat ini belum ada penetapan tersangka baru.

"Orang yang diperiksa bertambah, tapi belum ditetapkan statusnya. Jadi belum ada tersangka baru, tapi penyelidikan terus dilanjutkan dan saya kira mungkin hari-hari mendatang akan ada penetapan tersangka baru jika memang ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup seperti diatur dalam KUHAP," jelasnya.

Lebih lanjut, Yusril menyebut saksi yang telah diperiksa sejauh ini berasal dari internal Polri. Meski begitu, penyidikan masih dapat berkembang dan menjangkau pihak-pihak di luar institusi kepolisian apabila ditemukan keterlibatan berdasarkan bukti yang cukup. **(Egi)**

LIGA CHAMPIONS: PSG DITEMPEL MADRID

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Paris Saint-Germain dan Real Madrid menjadi dua tim tersisa yang masih mencatat hasil sempurna di babak fase grup Liga Champions hingga matchday keempat. Di belakang mereka, ada belasan tim lain dengan selisih poin tipis yang terus membuntuti demi menjaga kans lolos langsung ke 16 besar.

PSG menempati puncak klasemen dengan 12 poin setelah melibas Villarreal 6-0 pada Rabu (4/11) dini hari WIB. Mereka unggul selisih gol dari Real Madrid yang menumbangkan AEK Athens 3-2 sehari berselang.

Arsenal yang mengalahkan Slavia Praha 2-1 pada Kamis (5/11) dini hari WIB duduk di urutan ketiga dengan 10 poin. Bersama PSG dan Madrid, ketiganya menjadi tim yang belum terkalahkan sejauh ini.

Peringkat 4-12 diisi sembilan tim yang sudah mengoleksi 9 poin, berturut-turut yakni Como, Barcelona, Aston Villa, Manchester City, Liverpool, Club Brugge, Sporting CP, Real Betis, dan Borussia Dortmund. Mereka hanya dipisahkan oleh selisih dan produktivitas gol.

Bayern Munich ada di urutan 13 dengan 8 poin, disusul wakil Jerman lainnya, Stuttgart, dengan tujuh poin. Inter Milan, LASK, Manchester United, dan Galatasaray berada di urutan 15-18 dengan enam poin.

Fenerbahce ada di urutan 19 dengan 5 poin usai menekuk Liverpool 3-2 dini hari tadi. AS Roma, Shakhtar Donetsk, Viking, Atletico Madrid, PSV Eindhoven, dan Bodo/Glimt menempati peringkat 20-25 dengan empat poin. Perlu diingat, hanya peringkat 1-24 yang masuk fase gugur.

Matchday kelima akan digelar pada 25-26 November mendatang, tepat setelah jeda internasional berakhir.

Secara matematis, 36 tim peserta masih berpeluang lolos ke babak knockout.

(dts)





terbit setiap sore Senin s/d Sabtu

HARIAN MERDEKA
aspirasi rakyat

Langganan ePaper...

Dapatkan berita terkini setiap sore langsung di perangkatmu.
Hanya ***Rp50.000/bulan*** *Hubungin* ***Alan Oskar : +62 895-2285-1963***